

Pembentukan karakter moral dan etika warga negara melalui pendidikan anti korupsi

Naila Alivia

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110282@student.uin.malang.ac.id

Kata Kunci:

Pendidikan anti-korupsi, karakter moral, etika warga negara, integritas, rekonstruksi sosial.

Keywords:

Anti-corruption education, moral character, citizenship ethics, integrity, social reconstruction.

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar pelanggaran hukum menjadi sebuah patologi sosial yang bersifat struktural dan kultural. Upaya pemberantasan yang bertumpu pada pendekatan hukum penal (penindakan) terbukti mengalami kelelahan struktural (structural fatigue) dan gagal menyentuh akar hulu masalah. Artikel ini mengkaji secara komprehensif peran Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) sebagai instrumen preventif-strategis untuk merekonstruksi karakter moral dan etika kewarganegaraan (civic virtue). Dengan metode studi literatur, artikel ini menganalisis bagaimana internalisasi nilai integritas dapat memutus mata rantai normalisasi korupsi di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAK efektif

jika diimplementasikan melalui pendekatan tiga dimensi: kognisi moral, afeksi moral, dan tindakan moral yang didukung oleh ekosistem institusional yang transparan. Rekonstruksi moral melalui jalur edukasi ini merupakan investasi jangka panjang demi melahirkan warga negara yang memiliki imunitas etis terhadap perilaku koruptif.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has transformed from a mere legal violation into a structural and cultural social pathology. Eradication efforts based on a penal legal approach have proven to suffer from structural fatigue and fail to address the root causes of the problem. This article comprehensively examines the role of Anti-Corruption Education (PAK) as a strategic preventive instrument for reconstructing moral character and civic ethics (civic virtue). Using a literature study method, this article analyzes how internalizing integrity values can break the chain of normalization of corruption in society. The study results indicate that PAK is effective when implemented through a three-dimensional approach: moral cognition, moral affection, and moral action, supported by a transparent institutional ecosystem. Moral reconstruction through this educational pathway is a long-term investment in producing citizens with ethical immunity to corrupt behavior.

Pendahuluan

Realitas ruang publik kita hari ini memperlihatkan bahwa skandal korupsi tidak lagi memicu kemarahan publik, melainkan telah tereduksi menjadi sekadar background noise yang lumrah. Dari korupsi kelas kakap para elite politik hingga pungli skala mikro di level kelurahan, semuanya mengonfirmasi terjadinya desensitisasi moral yang akut. Alih-alih menolak, masyarakat cenderung bersikap permisif bahkan menjadi bagian dari lingkaran setan tersebut demi memangkas jalur birokrasi dan melancarkan urusan bisnis (Suyanto, 2005)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Di sisi lain, mengandalkan pendekatan pidana (penal) berupa penangkapan dan pemenjaraan terbukti hanya menyembuhkan gejala di permukaan. Tanpa disadari, strategi kuratif ini ibarat memangkas rumput liar tanpa mencabut akarnya; korupsi akan terus beregenerasi selama ekosistem pendukungnya masih subur. Akar masalah yang sesungguhnya terletak pada runtuhnya kompas etis personal dan hilangnya civic virtue. Ketika pragmatisme material serta kenyamanan instan mengorbankan kemaslahatan publik tanpa ada beban moral, di situlah etika kewarganegaraan kita sebenarnya telah mengalami kebangkrutan (Mulyana, 2011)

Krisis moral yang masif ini jelas tidak bisa diselesaikan hanya di dalam ruang sidang atau lembaga pemasyarakatan, melainkan harus diintervensi sejak dini melalui ruang-ruang kelas. Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) hadir bukan sekadar sebagai pelengkap kurikulum, pemanis akreditasi, atau bahan hafalan menjelang ujian. PAK musti diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) jangka panjang. Sebagai mahasiswa yang sering disebut sebagai agen perubahan (agent of change) sekaligus penjaga nilai (guardian of value), kita butuh "antivirus" ideologis yang kuat agar tidak ikut terinfeksi kultur korup begitu masuk ke dunia kerja atau birokrasi nanti. Lembaga pendidikan tinggi mengemban tanggung jawab moral yang besar untuk mendesain kurikulum berkarakter yang mampu membentengi moralitas mahasiswa dari kerusakan etis tersebut (Zubaedi, 2011). Oleh karena itu, artikel ini penting untuk mengupas bagaimana PAK bisa mendidik ulang kesadaran moral individu dan menegakkan kembali pilar etika warga negara yang berintegritas.

Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa krisis moral tidak lagi terbatas pada ruang publik, melainkan telah merambah ke dalam lini pendidikan melalui berbagai bentuk kecurangan non-akademik, dengan tindak korupsi sebagai sorotan utamanya (Yasri & Arumawan, 2023). Keterlibatan para pegiat pendidikan dalam pusaran korupsi ini menjadi ironi besar, mengingat institusi pendidikan merupakan sektor hulu yang memegang kendali atas mutu kognitif, afektif, dan psikomotorik masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, guna memutus rantai perilaku koruptif dan mencegah kemunduran bangsa, diperlukan sebuah intervensi strategis berupa penguatan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini demi mengembalikan fungsi esensial pendidikan sebagai pilar pembentuk karakter warga negara yang bersih.

Pembahasan

Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi memiliki urgensi yang sangat vital sebagai instrumen strategis untuk mengatasi fenomena penyimpangan identitas nasional yang tercermin dari maraknya pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Guna merekonstruksi ekosistem bernegara yang bersih, kurikulum pendidikan nasional harus difokuskan pada penanaman nilai-nilai moral, etika, serta kejujuran sejak dini demi membentuk karakter generasi muda yang memiliki komitmen kuat terhadap kebenaran dan keadilan. Melalui penguatan pondasi pendidikan kebangsaan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual ini, diharapkan akan lahir tunas bangsa serta aparatur sipil masa depan yang tidak sekadar kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas tinggi serta kesadaran moral yang kokoh untuk menolak segala bentuk praktik koruptif demi menjaga kedaulatan serta kelangsungan hidup negara (Faslah, 2024).

Dekonstruksi nilai integritas dalam Pendidikan Anti-Korupsi (PAK)

Ada kesalahan mendasar dalam cara sistem pendidikan kita mengajarkan moralitas, yaitu sering kali menyamakan antara "tahu" dan "melakukan." Dalam konteks PAK, proses pembelajaran kerap terjebak pada pendekatan legalistik-formal yang membosankan. Mahasiswa disuruh menghafal definisi korupsi menurut Undang-Undang, jenis-jenis pasal tindak pidana korupsi (tipikor), hingga ancaman hukumannya. Pola satu arah seperti ini gagal total karena hanya menyentuh permukaan kognitif. Orang yang hafal hukum belum tentu patuh pada hukum; bahkan, tidak jarang pengetahuan hukum itu dipakai buat mencari celah (loopholes) regulasi. Pendidikan nilai yang sejati seharusnya tidak sekadar menjadi transfer pengetahuan materi hukum, melainkan berfokus pada pembentukan konsep dan model karakter yang utuh (Samani & Hariyanto, 2012). PAK yang substansial harus mampu membedah dan memasukkan 9 Nilai Integritas yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi langsung ke dalam urat nadi kehidupan mahasiswa (KPK, 2019).

Dialektika karakter moral dan etika warga negara

Untuk memahami bagaimana sebuah proses pendidikan bisa mengubah perilaku nyata seseorang, kita bisa membedahnya menggunakan kerangka psikologi moral yang dirumuskan oleh Thomas Lickona. Menurutny, karakter yang utuh (good character) tidak akan tercipta kalau hanya mengandalkan hafalan, melainkan wajib melibatkan perkembangan yang seimbang antara tiga dimensi utama (Lickona, 2013):

1. *Kognisi Moral (Moral Knowing)*: Tahap awal ini berfokus pada kesadaran rasional seorang warga negara. Melalui PAK, mahasiswa tidak cuma tahu pengertian korupsi di atas kertas, tetapi juga mampu menganalisis dampak makronya secara kritis. Kita jadi paham bahwa setiap rupiah uang negara yang dikorupsi berbanding lurus dengan ambruknya jembatan di pelosok, buruknya fasilitas kesehatan bagi warga miskin, serta hilangnya kesempatan kuliah bagi anak-anak dari kelas pekerja.
2. *Afeksi Moral (Moral Feeling)*: Paham bahwa korupsi itu salah secara intelektual tidak akan mengubah apa pun kalau hati nurani kita mati rasa. Di sinilah aspek afektif mengambil peran. PAK bertugas menumbuhkan rasa empati yang mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban laten korupsi. Dari empati ini, akan muncul rasa bersalah (*guilt*) dalam diri jika kita ikut-ikutan berbuat curang, serta rasa malu (*shame*) yang kolektif sebagai sebuah bangsa.
3. *Tindakan Moral (Moral Action)*: Ini adalah muara akhir sekaligus ujian sesungguhnya dari etika warga negara (*civic ethics*). Karakter moral seseorang baru teruji ketika dia berada dalam situasi yang basah—di mana dia punya kesempatan besar, punya jaringan, punya kekuasaan untuk korupsi (atau minimal ikut memaklumi kecurangan demi cari aman)—namun dia memilih secara sadar, tegas, dan berani untuk menolaknya demi menjaga integritas dirinya sebagai warga negara yang etis.

Hubungan etika warga negara dengan karakter moral sangat linier. Warga negara yang beretika tinggi paham bahwa ruang publik bukanlah milik pribadi yang bisa dieksploitasi. Mereka memandang bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai jika setiap

individu membatasi egoismenya demi kemaslahatan bersama (*bonum commune*). PAK bertindak sebagai katalis yang mempercepat transformasi dari sekadar individu egois (*private self*) menjadi warga negara yang bertanggung jawab sosial (*civic self*).

Tantangan struktural dan taktik rekonstruksi ekosistem akademik

Tantangan terbesar dari mengampanyekan kejujuran hari ini adalah ketika kita harus menyuarakannya di tengah lingkungan yang hipokrit dan permisif terhadap kecurangan. Ada kontradiksi nyata yang sering dialami oleh mahasiswa: di dalam kelas kita dicekoki teori-teori integritas yang luhur, tapi begitu keluar kelas kita disuguhi realitas birokrasi kampus yang ruwet, praktik titip kursi dalam penerimaan mahasiswa baru, atau oknum dosen yang malas masuk kelas tapi pelit memberi nilai bagus kecuali ada "pendekatan khusus." Oleh karena itu, implementasi PAK tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan metode ceramah satu arah selama dua SKS seminggu. Perlu ada rekonstruksi total terhadap ekosistem pendidikan melalui beberapa strategi taktis (KPK, 2019):

1. Memutus Rantai Kemunafikan Institusional Lewat Keteladanan (*Role Modeling*): Pimpinan universitas, dekanat, hingga dosen harus mempraktikkan langsung apa itu transparansi. Mulai dari keterbukaan laporan keuangan kampus, penghentian praktik nepotisme akademik, hingga penerapan sistem penilaian yang objektif. Integritas institusi adalah laboratorium moral yang paling nyata bagi mahasiswa.
2. Transformasi Pedagogi: Dari Ceramah Monoton Ke *Problem-Based Learning*: Metode indoktrinasi satu arah yang bikin mengantuk harus segera ditinggalkan. Pembelajaran PAK jauh lebih berdampak kalau memakai pendekatan berbasis proyek sosial. Mahasiswa bisa ditugaskan untuk melakukan audit sosial sederhana terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, membedah pemanfaatan alokasi dana desa secara kritis, atau membuat proyek kampanye kreatif di media sosial untuk mengedukasi masyarakat awam tentang bahaya *money politics*.
3. Inkubasi Budaya Kontra-Kultur (*Counter-Culture*) di Kampus: Kampus wajib bertransformasi menjadi ruang yang aman (*safe space*) bagi tumbuhnya mentalitas berani bersuara. Pihak universitas harus menyediakan dan menjamin keamanan sistem pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) internal. Mahasiswa yang berani melaporkan indikasi pungli, manipulasi nilai, atau penyelewengan dana organisasi mahasiswa tidak boleh diintimidasi secara akademik, melainkan harus dilindungi hak-haknya.

Karakter moral merupakan segala aspek yang berkaitan erat dengan penilaian terhadap perbuatan baik maupun buruk seseorang. Menginternalisasikan konsep serta nilai-nilai moral yang baik kepada anak sejak usia dini sangatlah krusial karena masa tersebut merupakan fase utama dalam membangun kecerdasan moral mereka. Proses pembentukan ini tidak hanya sekadar melibatkan pembentukan kebiasaan semata, tetapi juga memerlukan kesadaran, pemahaman yang mendalam, hingga praktik nyata dari nilai-nilai moral tersebut. Merujuk pada teori karakter moral dari Thomas Lickona, karakter yang baik itu sendiri secara komprehensif dibangun melalui tiga komponen utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi, yaitu pengetahuan moral (*moral*

knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action) (Uyun, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Korupsi pada dasarnya adalah bukti nyata dari runtuhnya moralitas dan etika kewarganegaraan. Menghukum para koruptor lewat jalur pidana terbukti hanya mengobati gejala di permukaan tanpa pernah menyembuhkan penyakit intinya. Melalui reposisi Pendidikan Anti-Korupsi yang dikemas secara transformatif dan kontekstual, institusi pendidikan tinggi punya posisi tawar yang strategis untuk membenahi mentalitas generasi muda. Dengan menyatukan aspek kognisi, afeksi, dan tindakan moral yang bersumber dari 9 nilai integritas, PAK mampu membangun ulang kompas etis mahasiswa. Hasil akhirnya bukan sekadar mencetak sarjana yang cerdas secara intelektual dan ber-IPK tinggi, melainkan melahirkan warga negara yang punya imunitas moral (moral resilience) yang kokoh ketika nantinya mereka memegang simpul-simpul kekuasaan di Masyarakat. Output sejati dari pendidikan ini bukan sekadar mencetak sarjana dengan ipk tinggi di atas selembat ijazah formal, melainkan melahirkan warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial (civic self) yang kaku dan berintegritas, yang siap memutus mata rantai normalisasi kecurangan demi keberlanjutan dan kedaulatan moral peradaban bangsa di masa depan. Berdasarkan hasil kajian teoretis dan analisis situasi riil di lapangan, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi taktis demi optimalisasi dampak pak ke depan:

1. Bagi Pembuat Kebijakan dan Institusi Perguruan Tinggi: Kampus harus berhenti memandang PAK sekadar sebagai formalitas administratif pelengkap kurikulum. Nilai-nilai integritas harus dilekatkan ke dalam sistem birokrasi kampus itu sendiri melalui digitalisasi pelayanan, transparansi anggaran keuangan universitas, serta pembersihan jalur penerimaan mahasiswa baru dari segala bentuk nepotisme. Kampus juga wajib mengaktifkan *whistleblowing system* yang anonim dan aman demi melindungi hak-hak mahasiswa.
2. Bagi Dosen dan Pendidik: Diharapkan untuk memperbarui model pengajaran dengan meninggalkan metode ceramah tekstual. Pengajar harus lebih adaptif mengintegrasikan studi kasus riil (seperti membedah modus operandi korupsi anggaran publik) dan memanfaatkan media digital populer (podcast, video edukatif, esai visual) yang lebih bersahabat dengan kultur komunikasi generasi muda sekarang.
3. Bagi Mahasiswa: Mahasiswa dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman sikap permisif. Mulailah membangun kontra-kultur dari hal-hal kecil di lingkungan terdekat, seperti menolak keras budaya titip absen, boikot penggunaan joki tugas, dan berani mengkritisi transparansi anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan sendiri. Gerakan anti-korupsi harus dimulai sebagai sebuah gaya hidup (*lifestyle*) di lingkungan internal kampus.

Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Kerinduan dan Kedaulatan*. PT. Grup Literasi Nusantara Abadi. <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- KPK. (2019). *Panduan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. <https://aclc.kpk.go.id/pusat-edukasi/buku-panduan-pak>
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter (Terjemahan Juma Abdu Wamaungo)*. Bumi Aksara. <https://penerbitbumiaksara.co.id/educating-for-character>
- Mulyana, R. (2011). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/mengartikulasikan-pendidikan-nilai/>
- Samani, M. & Hariyanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Remaja Rosdakarya. <https://rosda.co.id/pendidikan/550-konsep-dan-model-pendidikan-karakter.html>
- Suyanto. (2005). Urgensi Pendidikan Karakter dalam Transisi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 145–158. <https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/Suyanto2005>
- Uyun, F. (2023). Penerapan Salat Dhuha dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Malang: Tinjauan Karakter Moral Thomas Lickona. *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 15(02), 400–415. <https://repository.uin-malang.ac.id/16896/>
- Yasri, H. L., & Arumawan, M. M. (2023). Pendidikan sosial anti kekerasan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 15–28. <https://repository.uin-malang.ac.id/16896/>
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group. <https://prenadamedia.com/product/desain-pendidikan-karakter/>